

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan pengelolaan UMKM yang baik dan benar merupakan salah satu pondasi atau dasar untuk bertumbuhnya suatu usaha kecil dan menengah menjadi lebih besar sehingga dapat membantu peningkatan pada perekonomian daerah maupun perekonomian negara. UMKM di Indonesia saat ini bertumbuh sangat pesat dan merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang berawal dari industri keluarga atau industri rumahan. Peranan UMKM di Indonesia sangatlah penting karena melalui UMKM tercipta lapangan – lapangan usaha atau lahan – lahan baru untuk mata pencaharian penduduk Indonesia di berbagai bidang ekonomi. Dan dengan menjamurnya UMKM di Indonesia, UMKM dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak sehingga angka pengangguran di Indonesia pun dapat diminimalisir. Melalui UMKM pula, tenaga masyarakat dapat diberdayakan secara maksimal dan juga dapat membantu perekonomian daerah tempat bertumbuhnya UMKM tersebut. Perkembangan UMKM di Indonesia mengharuskan para pemilik UMKM untuk bertahan dan siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya. Hal ini memacu para pemilik UMKM agar menciptakan usaha – usaha yang baru dan berbeda dengan menerapkan inovasi – inovasi baru pula dalam usahanya. Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri menuntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonomi suatu bangsa harus menjadi efektif, efisien, dan kompetitif. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar diharapkan mampu mengimbangi pembangunan diberbagai sektor dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara. Dalam hal permodalan bantuan sarana dan prasarana di Kabupaten Bondowoso sampai dengan 2017 tercatat sebanyak sekitar 37 ribu pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan, dan masih banyak lagi para

pelaku usaha yang masih belum menerima bantuan dari dinas dan juga terkadang para pelaku usaha masih kesulitan dana dan akhirnya mereka meminjam ke bank, Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank). Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa kredit, meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Dalam hal kurang efektifnya prosedur pengajuan bantuan kepada pelaku usaha, biasanya para pelaku usaha jika ingin mengajukan proposal bantuan terkadang masih menunggu 1 tahun bahkan lebih sedangkan ada yang mengajukan bantuan menggunakan cara yang sama tetapi bisa dapat bantuan terlebih dahulu, masih ada faktor yang mengakibatkan ketidakseragaman pada pelaku usaha.

Kurangnya tenaga pemantauan di lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kehadiran bidang pengembangan bisnis untuk memfasilitasi pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka.

Rendahnya penggunaan media pada pelaku usaha salah satu media informasi yang berisi potensi dan aktivitas Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Timur, situs yang kembangkan memungkinkan para pihak yang memiliki kepentingan dalam memberikan kebijakan maupun para pihak yang memiliki kepentingan dalam menjalin bisnis dengan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Timur dapat secara langsung berinteraksi. Harapannya sederhana dengan media ini semoga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bisa mengikuti kemajuan teknologi informasi dan dapat berkompetisi, yang pada akhirnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang serta mampu mewujudkan sebagai pilar perekonomian.

Namun data BPS menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus tahun 2010 mencapai 8.319.779 jiwa. Ini membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai tugas yang begitu berat dalam mengentaskan proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan rumusan kebijakan dari lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menumbuh kembangkan industri dalam negeri sebagai prasyarat meningkatkan pendapatan negara. Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997. Hingga tahun 2011 UMKM mampu memberikan andil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9% pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28% PDB, sektor usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha menengah 14,7% melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1% PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011). Bahkan beberapa hasil penelitian (Nurhajati : 2005, hal 7) menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga sulit berkembang antara lain ketidakmampuan dalam manajemen, lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, kurang berpengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan. Menghadapi persoalan-persoalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dikemukakan di atas, pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara telah melakukan berbagai upaya yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan daya saing ekonomi Indonesia.

Dapat dilihat dari BPS Pusat bahwa Tahun 2018 diprediksi akan menjadi puncak pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini didasari oleh data survei Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dengan Badan Pusat Statistik (2016) bahwa industri ekonomi kreatif di Indonesia pada 2015 lalu tercatat menyumbangkan Rp 852 triliun kepada pendapatan domestik bruto (PDB) nasional, dan di tahun 2016 tercatat naik mencapai Rp 922,58 triliun dengan nilai kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 7,44 persen. Berkembangnya industri ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan dari *e-commerce* di Indonesia. Bahkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan pertumbuhan *e-commerce* mencapai 60 persen hingga 80 persen per tahun. Semakin tidak terbendungnya pasar digital menjadikan *e-commerce* berpotensi menjadi salah satu pondasi kekuatan ekonomi Indonesia. Proyeksi yang dilansir oleh Price Waterhouse Cooper (PWC) menempatkan Indonesia akan berada di posisi ke-5. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia tahun 2030 diprediksi akan mencapai US\$ 424 trilliun. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah mendorong UMKM Indonesia untuk *go online* karena 60 persen kekuatan ekonomi Indonesia berada di sektor UMKM. Hingga saat ini, pemerintah menyediakan saluran untuk UMKM mengembangkan usahanya melalui *e-commerce*. Sejalan dengan itu, *marketplace* yang mempunyai *unique selling point* 'kekuatan sinergi group', BLANJA.com, memiliki misi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melalui peningkatan kesempatan bagi produk asli Indonesia menembus pasar nasional dan internasional. Seperti dilansir Kominfo, UKM merupakan representasi ekonomi rakyat dikarenakan dapat menyerap tenaga kerja $\pm 90\%$ serta memberikan kontribusi sebesar 58% pada Produk Domestik Bruto Nasional. "Industri ekonomi kreatif yang bergerak di infrastruktur digital terus berkembang dengan pesat dan menawarkan berbagai solusi yang dapat membantu pelaku industri kreatif. Dan di sini lah peran BLANJA.com untuk membuka keterbatasan, mendorong perubahan, serta meningkatkan peluang bagi produk lokal agar dapat bersaing dengan produk import.

Penjualan online bersinergi dengan berbagai *stakeholders* pemerintah melalui lima kementerian, yaitu Kementerian BUMN melalui RKB (*#blanjajemputukm*, Rumah Kretif BUMN); Kementerian Komunikasi dan Informatika UMKM Go Online; Kementerian Perindustrian dalam program e-smart IKM; Kementerian Sosial dan Kementerian Perdagangan, Smesco, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Selama 2017, program ini telah berhasil meng-*online*-kan kurang lebih 30.000 UKM yang tersebar di 60 kota Indonesia dan naik sekitar 390 persen dari tahun sebelumnya pada 2016. Pertumbuhan UKM meningkat cukup signifikan. Para pelaku UKM diharapkan tidak hanya menjadi penjual *online*, tapi juga menjadi pebisnis online. sumber; Warta Ekonomi.co.id, Jakarta-

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur, berdasarkan survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim hingga akhir 2012, mencapai tak kurang dari 6,8 juta UMKM, Jumlah itu sekitar 50 persen lebih banyak ketimbang jumlah UMKM berdasarkan survey hingga tahun 2006 yang juga dilakukan BPS Jatim, yang mencapai angka 4,2 juta UMKM. Fakta tersebut mengemuka dalam seminar hasil survey UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2012 yang digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim di Surabaya, Jumat (31/5/2013). Menurut Kepala BPS Jatim, Irlan Indrocahyo, hingga akhir 2012 jumlah UMKM di Jatim mencapai 6.825.931 usaha. Komposisinya, UMKM yang bergerak di sektor pertanian sebesar 60,25 persen dengan jumlah unit usaha sebanyak 4.112.443 usaha, dan sektor non pertanian sebesar 39,75 persen dengan jumlah unit usaha sebanyak 2.713.488 usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan pentingnya bantuan sarana kepada pelaku usaha di Kabupaten Bondowoso, maka perlu melakukan penelitian pada perkembangan pelaku usaha dengan cara mencari informasi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso di bidang UM. Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah yang dapat

dirumuskan Sejauhmana pengaruh Upaya Pemerintah Terhadap Peningkatan Usaha Kecil, Studi Pada Usaha Tape Dan Batik Di Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengertahui Sejauhmana Pengaruh Upaya Pemerintah Terhadap Peningkatan Usaha Kecil, Studi Pada Usaha Tape Dan Batik Di Kabupaten Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia politik tentang upaya pemerintah terhadap peningkatan usaha kecil tape dan batik yang ada di kabupaten Bondowoso.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti mengenai peningkatan usaha kecil tape dan batik yang ada di kabupaten Bondowoso khususnya dalam hal umkm, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam referensi untuk peneliti selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Agar pemerintah kabupaten bondowoso dapat mengevaluasi hasil dari pelaku usaha tape dan batik agar tahun kedepannya dari segi pengembangan maupun bantuan bisa lebih meningkat lagi agar usaha tape dan batik kabupaten bondowoso bisa bersaing dengan kabupaten maupun dengan negara lainnya.